

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK MOHAMMAD NATSIR

A. Sosok Pribadi Mohammad Natsir

1. Riwayat Hidup

Mohammad Natsir lahir di Alahanpanjang Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Ia bergelar Datok Sinaro Pandjang. Ayahnya bernama Idris Sutan Saripado, seorang pegawai pemerintah Belanda dan ibunya bernama Khadijah dari keturunan suku Caniago.

Jenjang pendidikan Natsir dimulai ketika berumur 8 tahun dengan masuk pada HIS (Hollandsh Inlandsche School) Adabiyah Padang. Beberapa lama kemudian dipindahkan ke HIS milik pemerintah di Solok dan tinggal di rumah seorang saudagar bernama Haji Musa. Beliau masuk sekolah pada pagi hari, sore hari belajar di Madrasah Diniyah, dan malam hari mengaji al Qur'an. Tiga tahun kemudian ia dipindahkan ke HIS Padang dan tinggal bersama kakaknya, Rabi'ah.

Pada tahun 1923 ia meneruskan sekolah ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, setingkat SMP sekarang) di Padang. Kemudian masuk menjadi anggota JIB (Jong Islamieten Bond) Cabang Padang.

Pada tahun 1927 ia masuk AMS (Algemene Middelbar School, setingkat SMU sekarang) di Bandung dan mengambil bidang kesusasteraan barat klasik. Di MULO dan AMS ia mendapat Beasiswa dari pemerintah. Sejak di AMS inilah ia mulai belajar pengetahuan agama. Waktu-waktu luangnya selalu digunakan untuk belajar agama. Orang yang selalu membimbingnya adalah Ustadz A. Hassan, tokoh ulama yang dibelakang hari kemudian menjadi orang nomor satu di PERSIS (Persatuan Islam), sebuah organisasi yang bertujuan memberlakukan Hukum Islam berdasarkan al Qur'an dan hadits di masyarakat, berusaha keras menghidupkan jihad dan ijtihad serta membasmi bid'ah, khurafat takhayul, taqlid, dan syirik. (Ensiklopedi Islam IV, 1994 : 95)

Disamping itu Natsir juga mulai aktif dalam JIB Cabang Bandung dan kemudian menjadi ketuanya pada tahun 1928-1932. JIB banyak beranggotakan pemuda-pemuda Islam yang mayoritas adalah pelajar-pelajar bumiputera yang bersekolah pada sekolah-sekolah Belanda. Organisasi ini mendapat pengaruh cukup kuat dari Agus Salim, seorang tokoh intelektual Indonesia dan juga pemimpin Sarekat Islam.

Sejak itu ia mulai berfikir bagaimana menyadarkan bangsanya, membebaskannya dari penindasan, kebodohan, dan penderitaan. Ia juga memiliki tekad yang besar untuk meluruskan bangsanya dan umat Islam khususnya dari kesalahpahaman dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama. Karena itulah ia sangat membenci penjajah, bahkan karena keteguhannya

memegang prinsip, ia menolak mentah-mentah ketika ditawari untuk melanjutkan sekolah ke Fakultas Hukum di Jakarta dan Fakultas Ekonomi di Rotterdam Belanda dengan fasilitas beasiswa, padahal pada saat itu sedikit sekali orang Indonesia yang mempunyai kesempatan emas seperti itu. Natsir lebih suka masuk ke sekolah pelatihan bagi guru non eropa yang ia selesaikan pada tahun 1932. (Kahin, 1993 : 53)

Pada tahun itu juga Natsir mendirikan Pendidikan Islam (Pendis) yang berdiri hingga tahun 1942, ketika Jepang menerapkan kebijaksanaan untuk menutup sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Natsir menjelaskan bahwa kurikulum Pendis memasukkan kecenderungan-kecenderungan liberal baru seperti dalam Pendidikan Arbeit Jerman, yang menekankan pendidikan praktis sebagaimana dicontohkan lewat satu lapangan yang diserahkan kepada para pelajar untuk dijadikan lahan pertanian.

Sebagai aktivis JIB (Jond Islamieten Bond, Serikat Pemuda Islam), terutama sebagai anggota lembaga inti (Kernlichaan) organisai tersebut, Natsir aktif pula memberikan pelajaran tentang Islam kepada para pelajar sekolah menengah, diantaranya kepada para pelajar MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Jalan Jawa Bandung (Rosidi, 1988 : xiii)

Sejak usia muda, yaitu ketika masih di AMS, Natsir sudah mulai berpolemik, terutama melalui tulisan-tulisannya di surat kabar. Ia menulis pertama kali untuk majalah A.I.D, sebuah surat kabar berbahasa Belanda yang

terbit di Bandung. Dalam tulisannya itu Natsir mengkritik isi khutbah di Gereja yang disampaikan pendeta Cristoffel yang mendiskreditkan Islam. Beberapa lama kemudian Direktur A.I.D. menutup polemik itu sehingga Natsir tidak bisa lagi menulis jawaban atas bantahan Cristoffel. Solusinya ia menulis jawabannya dan menyerahkannya untuk dimuat dalam majalah Pembela Islam di beberapa edisi berurutan. Tulisan ini beberapa waktu kemudian dicetak dalam brosur kecil dan diberi judul, *Mohammad Als Profeet*.

Natsir memulai karir politiknya ketika mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) dan terpilih menjadi ketua cabang partai ini di Bandung pada awal tahun 1940. Selain itu ia juga aktif dalam kepemimpinan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), suatu badan organisasi sosial politik Islam yang didirikan menjelang berakhirnya penjajahan Belanda.

Sejak awal penerbitan majalah Pembela Islam, Natsir sudah terlibat di dalamnya. Nomor pertamanya terbit pada bulan Oktober 1929. ... Karangan-karangan yang dimuat dalam majalah Pembela Islam kecuali yang tadinya ditujukan kepada publik lain, seperti *Mohammad als Profeet*, itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa karangan-karangan pertama Natsir dalam bahasa Indonesia dimuat dalam majalah tersebut. (Rosidi, 1988: xv)

Tulisan-tulisan Natsir merupakan fenomena baru bagi syiar Islam di Indonesia pada saat itu, sebab tulisan-tulisan Natsir disamping membela Islam dari serangan kritik orang-orang yang membenci Islam atau kurang tahu

bagaimana sebenarnya Islam juga membalas serangan tersebut dengan pemikiran-pemikiran yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Tarmidzi Taher dalam sebuah seminar : “Mohammad Natsir adalah diantara sedikit manusia Indonesia yang multidimensional dan begitu kompleks. Ia adalah seorang pemikir dan pembaharu pemikiran dan pengamalan Islam. Ia juga adalah intelektual Muslim yang akrab dengan berbagai wacana pemikiran, baik warisan pemikiran Islam sendiri, maupun pemikiran timur dan barat”. (Taher, 1996 : 14).

Disamping menghadapi golongan Kristen yang kebanyakan adalah orang-orang Belanda Natsir juga menghadapi golongan yang populer disebut “*netral agama*”. Ajip Rosjidi mendefinisikan golongan ini sebagai mereka yang berbangsa Indonesia serta memeluk pula secara formal, tetapi mengesampingkan agamanya itu dengan alasan demi menjaga persatuan bangsa (Rosjidi, 1988 : xvi). Golongan ini diwakili oleh Soekarno.

Polemik Natsir-Soekarno ini semakin hebat setelah majalah Pembela Islam berhenti terbit. Melalui majalah-majalah yang terbit menjelang akhir tahun 1930-an polemik tersebut terus berlangsung, sehingga menurut Ajip memisahkan mereka dalam dua golongan *kaum nasionalis Islami* dan *kaum nasionalis sekuler*.” (Ajip, 1980 : xvii). Penilaian ini menentukan warna kehidupan politik di Indonesia hingga masa-masa perjuangan, pasca kemerdekaan, bahkan sampai saat ini.

Karir politik Natsir kian menanjak dan berkembang. Hal ini didukung oleh semakin akrabnya pergaulan Natsir dengan para tolok politik seperti Agus Salim, Wihono Purbohadijoyo dan Syamsu Rizal. Disamping itu pribadi A. Hassan juga sangat berpengaruh pada pemikiran-pemikiran Natsir.

Persis sendiri, menurut Kahin, saat itu dikenal sebagai organisasi yang berorientasi modernis yang selalu menekankan bahwa Islam merupakan sebuah "sistem politik dan sosial" dan bukan hanya perangkat ritual belaka. Natsir tampaknya juga sependapat dengan apa yang diutarakan H.A.R. Gibb dalam sebuah tulisannya, "*Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization.*"

Hasil kegigihan dan kesungguhan perjuangan Natsir mulai ia rasakan ketika pada tahun 1932 ia diangkat menjadi Direktur Pendidikan Islam di Bandung, kemudian pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) ia diangkat menjadi Kepala Biro Pendidikan Kotamadya Bandung.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari perhatiannya yang sangat serius pada masalah pendidikan (Kumpulan karangannya dalam *Capita Selecta* banyak menyinggung masalah pendidikan Islam ini). Ia merupakan pencetus konsep pendidikan integral yang aplikasinya diterapkan pada Pendis yang menyatukan kurikulum pendidikan Barat dengan kurikulum pendidikan Islam, sehingga memiliki kecenderungan sebagai "pendidikan Islam modern".

Setelah Indonesia merdeka (1945-1946) ia menjadi anggota Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan kemudian menjadi wakil ketua lembaga ini pada tahun yang sama.

Pada tahun itu juga disamping aktif dalam keanggotaan KNIP, ia juga aktif dalam Anggota Dewan Partai Masyumi. Di Masyumi ia segera muncul bersama Syafruddin Prawiranegara dan Mohammad Roem sebagai sayap progresif partai dan kemudian sebagai “kaum sosialis-relijius”. Beberapa tahun kemudian, Natsir menjelaskan kepada saya bahwa istilah “sosialis religius” kurang tepat untuk dikenakan kepada formula sosio-ekonomi yang dibangunnya bersama koleganya. Istilah tersebut tidak memadai untuk menyebut sebuah konsep ekonomi campuran yang mencakup komponen-komponen sosialis, kooperatif, dan privasi. (Kahin, 1995 : 59)

Karir Natsir di bidang pemerintahan semakin menanjak hingga menjabat sebagai Menteri Penerangan dua periode pada era kabinet Sahrir dan Hatta (1946-1949). Tidak sampai disitu saja, akhirnya puncak karir politik Natsir sampai pada puncaknya ketika ia diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 1950-1951.

Pelantikannya sebagai Perdana Menteri adalah konsekwensi yang wajar dari kedudukannya sebagai ketua Partai Masyumi, partai politik terbesar di Indonesia di masa itu. (Yusril, 1995 : 120-121) Disamping itu karya besar Natsir berupa “*Mosi Integral*” yang disampaikan pada konstituante pada tahun 1950 juga menjadi motif utama pengangkatannya. *Mosi Integral* ini berhasil menyelamatkan Republik Proklamasi dan menjaga Persatuan dan Kesatuan bangsa. Tetapi sayang mosi Natsir ini sudah banyak dilupakan orang.

Keberhasilan Natsir menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan tidak membuat ia sombong dan melupakan sifat-sifat kritis dalam menghadapi situasi sosial yang berkembang saat itu. Tetapi sebaliknya, dengan posisi yang ia miliki, ia selalu berusaha semaksimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip, baik dalam perilaku pribadinya maupun perilaku kenegaraannya. Ia juga tetap berpolemik dengan Soekarno pada saat orang yang disebut terakhir ini semakin getol mengajarkan marxisme sebagai ideologi bangsa dan memberi ruang gerak terlalu luas kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mengenai penolakan Natsir terhadap komunisme sebuah tulisan mengatakan :

Sebagai salah seorang perumus ideologi politik Islam berkarakter modernis Natsir memang mempunyai alasan-alasan doktriner dan ideologis untuk menolak kehadiran kaum komunis. Tetapi Soekarno melihatnya dari sisi lain. Baginya kaum komunis di Indonesia adalah kegiatan radikal dan revolusioner yang dapat menjadi salah satu unsur kekuatan dinamika bangsa. Soekarno sepertinya yakin bahwa kaum komunis di Indonesia bercorak “nasionalis” yang berbeda dengan komunis di negara-negara lain. (Yusril, 1996: 2)

Pertentangan antara Natsir dan Soekarno semakin memuncak ketika Soekarno pada tahun 1956 melahirkan gagasan untuk mengubur partai-partai politik dan mengganti demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin. Bagi

Natsir demokrasi semacam ini akan mengarah pada diktatorisme dan tentu saja hal ini akan sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Realitas diatas menunjukkan bahwa kelemah-lembutan Natsir tidak akan meluluhkan prinsip-prinsip yang dipegangnya. Selama sesuatu hal sesuai dengan prinsip, maka Natsir akan mempertahankannya, tetapi apabila bertentangan, maka Natsir akan menjadi lawan yang tangguh yang sangat sulit ditakhlukkan oleh siapapun.

Pada tahun 1959 Natsir ditangkap atas tuduhan terlibat dalam PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang menjadi saingan pemerintahan pusat di Jakarta. PRRI sendiri sebenarnya dimotori oleh tokoh-tokoh militer di Sumatera, dan gerakan ini beberapa lama kemudian diikuti oleh para tokoh militer di Sulawesi dengan gerakan PERMESTA.

Sebenarnya, menurut beberapa pengamat politik, kehadiran Natsir ke Sumatera adalah untuk mewakili Masyumi dalam rangka mencari jalan damai untuk menyelesaikan masalah kenegaraan saat itu. Dalam hal ini Yusril mengatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 1957, Masyumi menarik semua menteri dari kabinet karena perbedaan pandangan dalam menangani berbagai kesulitan negara. Namun dari statemen 12 poin yang ditandatangani oleh Mohammad Natsir dan M. Yunan Nasution, dapat diketahui dengan jelas bahwa sebab terpokok penarikan mereka dari koalisi adalah karena Ali dan Nasution telah merencanakan untuk menghadapi gerakan-gerakan daerah dengan

kekerasan. Sedang Masyumi ingin agar masalah itu dihadapi dengan damai, terutama sekali dengan memulihkan dwi integral Soekarno - Hatta sebagai titik tolak dalam mengadakan dialog dengan tokoh-tokoh daerah. (Yusril, 1988 : 150)

Mohammad Roem dalam biografinya mengatakan bahwa peranan orang-orang sipil dalam PRRI itu adalah *second role*. Yang inti adalah perwira-perwira pemimpin dewan itu. Mengenai keterlibatan Natsir dalam PRRI ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan diantara tokoh-tokoh sejarawan Indonesia, meskipun pihak pemerintah Indonesia sendiri sejak awal orde baru secara tidak transparan sebenarnya telah memberi "black list" terhadap tokoh-tokoh sipil yang dianggap terlibat.

Setelah ditangkap Natsir diasingkan dengan menjalani karantina politik di Batu Malang Jawa Timur dan selanjutnya dijadikan tahanan politik di rumah tahanan militer (RTM) Keagungan Jakarta hingga pada Juli 1966 Natsir dibebaskan tanpa proses pengadilan. Pembebasan ini disebabkan oleh adanya desakan dari angkatan 1966, terutama KAPPI (Kesatuan aksi Pemuda Pelajar Indonesia) yang ditulangi oleh PII dan oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang ditulangi oleh HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).

Pasca keluar penjara, Natsir lebih mengarahkan orientasi pada da'wah Islamiyah dengan mendirikan DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) dan menjadi ketuanya. Disamping itu ia juga aktif dalam organisasi Islam

Internasional seperati menjadi presiden Kongres Muslim se Dunia (World Moslem Congress) di Makah pada tahun 1969 dan anggota Dewan Masjid se Dunia (al Masjid al a'la al alami lil masājid). Karena peran yang dimainkannya pada dunia Islam internasional, ia mendapatkan penghargaan dari King Faisal Fondation dari Arab Saudi. (Ensiklopedi Islam IV, 1994 : 21)

Aktifnya Natsir dalam organisasi-organisasi tersebut tidak mengurangi sikap kritisnya terhadap mekanisme pemerintahan pada waktu itu. Disamping ia mengakui suasana aman dan nyaman pada saat-saat awal orde baru, ia juga mengkritik orde baru yang mulai tidak konsekwen melaksanakan janjinya.

Ketika Orde Baru mulai memimpin Natsir berharap akan adanya mekanisme kepemimpinan Soeharto bisa membawa angin baru bagi dinamika kemasyarakatan. "Orde baru kita mulai dengan harapan baru, dan memperbaiki kembali apa yang sudah dirusak orde lama, yang dimulai dengan menyelinapnya pengaruh PKI ke dalam Istana Negara. (Natsir, 1984 : 2)

Sepak terjang Natsir di dunia internasional membuat ia banyak dikenal oleh masyarakat internasional sebagai pemikir sekaligus pejuang Islam yang gigih. Bahkan ketika pemerintah Indonesia berusaha mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, Natsir merupakan orang yang menjadi inspirator utama keberhasilan Indonesia. Mengenai hal itu Natsir bercerita :

"Pemimpin-pemimpin Islam yang waktu itu masih berada dalam tahanan orde lama di Jalan Keagungan Jakarta atas usul perwira menengah Sofyar dari Kostrad dengan senang hati turut serta mengusahakan lancarnya pertemuan pertama antara delegasi Indonesia dibawah pimpinan Laksamana Syarif dengan

Perdana Menteri Tengku Abdurrahman di Kuala Lumpur untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia.” (Natsir, 1984 : 5)

Pada masyarakat Indonesia ia dikenal sebagai pembawa hati nurani ummat. Kesederhanaan dan keikhlasannya sangat dikenang oleh banyak kalangan. Ada satu kisah begini :

- Ketika Natsir menjadi perdana menteri ia diberi inventaris sebuah mobil sedan yang “cukup kuno”. Kemanapun ia pergi selalu mobil-mobil itu saja yang dibawanya. Padahal dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri ia bisa saja minta ganti mobil kapan saja.
- Kalau ia pergi ke kantornya, ia selalu menggunakan pakaian yang, dalam ukuran Perdana Menteri, sebenarnya kurang pantas dipakai karena sudah sobek di beberapa tempat. Melihat hal ini anak buahnya kemudian mengadakan iuran untuk membelikannya sebuah baju yang pantas dipakai.
- Anas Adnan pernah bercerita kepada saya (penulis), bahwa ia berhasil sekolah di Ummul Qura Makkah Al Mukarramah adalah karena memo-nya Pak Natsir. Setelah beberapa bulan tinggal di Makkah, ia belum mendapat kartu mahasiswa, sehingga ia tidak bisa mengambil jatah uang beasiswa. Ketika kebetulan pada bulan itu pak Natsir pergi ke Makkah dan bertemu dengannya, ia mengungkapkan masalah ini, bahkan ia mengatakan “terpaksa pinjam” pada seorang temannya yang orang arab. Kontan Natsi kemudian menyuruh sekretarisnya untuk memberi uang padanya.

Natsir wafat pada tanggal 6 Pebruari 1993 dalam umur 85 tahun. Ia wafat dengan meninggalkan jasa yang sangat besar bagi tumbuh besarnya Republik kita ini, tetapi sayang jasanya ini banyak dilupakan oleh orang-orang, karena kurang-mengertian mereka pada sejarah perjalanan negeri mereka sendiri.

2. *Situasi Sosial Politik pada Masanya*

Semasa Natsir hidup berlaku sistem pemerintahan multi partai dengan kabinet parlementer sebagai perwujudannya. Kebanyakan partai yang ada saat itu belum mapan karena memang Bangsa Indonesia belum lama terlepas dari penjajahan Belanda.

Heterogenitas partai ini disamping memberi pengaruh positif bagi kehidupan demokrasi juga mengakibatkan efek negatif berupa rivalitas (persaingan) antar partai politik yang membuat situasi semakin memanas dari hari ke hari. Hal ini terjadi karena masing-masing partai berambisi memperoleh dukungan mayoritas rakyat Indonesia sehingga bisa menentukan hitam-merahnya kehidupan bangsa. Keadaan ini masih diperparah lagi oleh keinginan pemerintah Belanda untuk mencaplok kembali Indonesia merdeka.

Pada tahun 1949 sampai tahun 1942 Natsir memimpin partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), partai yang dikemudian hari menjadi Partai terbesar hingga tahun 1952, ketika NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai

politik yang berdiri sendiri. Dominasi Masyumi ini kemudian membawa Natsir pada puncak karier politik ketika ia diangkat menjadi Perdana Menteri.

Posisi ini tentu saja mempengaruhi sepak terjang, prilaku, dan pemikiran politiknya. Sebab disamping ia harus berfikir dalam perspektif idealis ia harus juga memperhatikan kepentingan parlemen yang beranggotakan wakil-wakil partai lain dan sekaligus merupakan rival-rival politiknya yang tentu saja mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga masing-masing pihak merasa terwakili keberadaannya.

Dengan demikian Natsir mempunyai pengalaman pahit getirnya mengendalikan kekuasaan dan ikut serta memimpin negara yang masih muda. Ada masanya ia menjadi menteri dan perdana menteri, tetapi ada masanya pula ia menjadi oposisi di parlemen. Tokoh yang berada dalam posisi demikian memang terdorong untuk mengambil langkah-langkah kompromistik dengan mempertimbangkan formasi kekuatan politik riil di lapangan. (Yusril, 1996 : 70)

Kepemimpinan Soekarno yang tampak memberikan ruang cukup luas pada PKI (Partai Komunis Indonesia). Kebijakan Soekarno ini tampak dari ajaran Nasakom yang dipromosikannya sebagai *ideal system*. Disamping itu Soekarno juga menerapkan demokrasi terpimpin yang apabila berkembang terus bisa mengarah pada diktatorisme dan absolutisme.

Kebijakan politik Soekarno ini cukup memicu panasnya suhu politik di Indonesia. Natsir dan teman-teman sefahamnya menjadi oposan terkuat dari kebijakan tersebut. Ia berusaha untuk menolak mentah-mentah

kebijaksanaan tersebut, baik melalui jalur-jalur formal di parlemen maupun jalur non formal dengan polemik-polemik di media massa.¹

3. *Karya-karyanya*

Natsir, disamping seorang organisatoris juga seorang mukhlis yang rajin berdakwah, menulis dan berdialog dengan siapa saja. Ada beberapa karangan yang merupakan hasil ketekunannya dalam menulis, yaitu :

1. *Capita Selecta*, yang berisi kumpulan pidatonya di beberapa forum dan karangan-karangan yang dimuat dalam beberapa media massa. dihimpun oleh D.P. Sati Alimin dan cetakan terakhirnya diterbitkan oleh Bulan Bintang. Buku ini memuat pemikiran Natsir di berbagai bidang kehidupan sosial, seperti kebudayaan, filsafat, pendidikan, agama, dan politik kenegaraan.
2. *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah*, berisi kumpulan karangan yang dihimpun oleh Endang Syaifuddin Anshari dan diterbitkan oleh Girimukti Pasaka.
3. *Dunia Islam dari Masa ke Masa*, berisi karangan Natsir tentang World Islam Festival dalam Perspektif Sejarah dan beberapa karangan lain. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Panji Masyarakat.

¹ Untuk informasi yang lebih jelas mengenai pertentangan Natsir dengan Soekarno, lihat : Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press (cet. pertama), 1988

4. *Fiqhud Da'wah*, berisi pemikiran-pemikiran Natsir tentang dakwah, dan diterbitkan oleh Media Dakwah.
5. *Islam dan Kristen di Indonesia*, berisi perbandingan antara Islam dan Kristen dan merupakan tulisan Natsir dalam menanggapi hubungan sosial keagamaan, khususnya Islam-Kristen di Indonesia pada saat itu.
6. *Indonesia di Persimpangan Jalan*, berisi tulisan Natsir tentang beberapa kebijaksanaan Orde Baru khususnya mengenai mekanisme kepartaian yang menurut Natsir terdapat ketimpangan disana-sini.

B. Pemikiran Politik Mohammad Natsir

1. Kedudukan Politik dalam Islam

Mohammad Natsir adalah sosok yang senantiasa memandang agama sebagai suatu sistem yang universal dan meliputi berbagai segi kehidupan. Islam baginya bukan semata-mata “peribadatan” dalam pengertian sehari-hari saja seperti shalat dan puasa, tetapi yang dikatakan agama menurut pengertian Islam adalah meliputi kaidah-kaidah, hudud-hudud (batas-batas) dalam muamalah (pergaulan) dalam masyarakat menurut garis-garis yang telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri. (Natsir, 1973 : 436-437)

Sebagai agama yang lengkap Islam juga mengatur kehidupan politik, sebab bagaimanapun juga politik merupakan “kebutuhan” manusia dalam

hubungannya dengan manusia lain. Jadi antara agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, "*intergreerend dell*" kalau meminjam istilah Natsir. Negara adalah alat untuk aplikasi ajaran Islam :

Negara, bagi kita, bukan tujuan tetapi alat. Urusan kenegaraan pada dasarnya adalah suatu bagian yang tak dapat dipisahkan, suatu *intergreerend dell* dari sistem Islam. Yang menjadi tujuannya adalah : Kesempurnaan berlakunya undang-undang ilahi, baik yang berkenaan dengan perikehidupan manusia sendiri (sebagai individu) ataupun sebagai anggota dari masyarakat, baik yang berkenaan dengan kehidupan yang fana ini, ataupun yang berhubungan dengan kehidupan kelak di alam baka. (Natsir, 1973 : 442)²

Natsir juga mengatakan bahwa banyak keterangan-keterangan dikemukakan dengan tegas dan sungguh-sungguh bahwa dalam Islam politik dan agama tidak seharusnya dipisahkan" (Natsir, 1988 : 205)

Penolakan Natsir terhadap pemisahan agama dan negara juga tampak sekali ketika ia mengomentari persepsi Soekarno yang memisahkan agama dengan negara ketika terjadi polemik antara keduanya. Soekarno waktu itu mengatakan : "Tak ada *ijma'* ulama tentang agama dan negara harus bersatu". Natsir kemudian menjawab , "Baik, tapi kita bertanya pula mana pulalah *ijma'* ulama yang mengatakan bahwa agama dan negara tidak harus bersatu?" Juga tidak ada ! Kalau dalam hal ini hendak dipakai *ijma'*-*ijma'* ulama sebagai alasan, sudah tentu yang satu mau memisahkan dengan alasan tidak ada *ijma'* ulama

² Teks asli buku ini masih menggunakan ejaan lama, untuk mempermudah dalam membaca dan memahaminya penulis mentransfernya ke dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

untuk bersatu, dan yang lain mau mempersatukan dengan alasan tidak ada ijma' ulama untuk memisahkan. (Natsir, 1973 : 440)

Menurut Natsir al Qur'an memang tidak secara khusus menentukan apa dan bagaimana negara, tetapi secara global ada konsep-konsep prinsipal yang diatur oleh al Qur'an. Ini tidak menyangkut masalah kenegaraan saja, masalah-masalah lainpun Islam hanya memberi aturan secara global. Islam tidak menunjukkan cara bagaimana mengatur anggaran belanja, tidak mengatur valuta, tidak mengatur devisa, tidak mengatur lalu lintas dan hal-hal rumit lainnya. Bagi Natsir ini tidak perlu diatur dengan wahyu ilahi yang bersifat kekal, sebab semua itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan keduniaan yang dapat berubah sewaktu-waktu menurut tempat, zaman, dan keadaan. (Natsir, 1973 : 443)

Yang diatur Islam ialah dasar dan pokok-pokok aturan masyarakat manusia yang bentuk-bentuk kepentingan dan keperluannya selalu berubah-ubah selama manusia masih bersifat manusia baik ia manusia zaman onta atau manusia zaman kapal terbang, atau manusia zaman kapal stratosfer dan lain-lain nanti. (Natsir, 1973 : 447)

Dengan cara pandang semacam ini tampak bahwa Natsir memandang ajaran Islam sebagai tatanan yang kompleks dan universal, sehingga bisa dipakai kapan saja dan dimana saja sesuai keadaan lingkungan yang ada pada masyarakat bersangkutan. Atas dasar hal ini tentu saja al Qur'an tidak mungkin mengatur kehidupan manusia dalam kasus perkasus secara parsial, sebab prosesi penurunan wahyu telah berakhir dengan wafatnya rasulullah, sementara

perjalanan hidup manusia tidak berakhir dengan berakhirnya proses wahyu dan akan terus berkembang dalam intensitas permasalahan yang kian hari kian kompleks jenisnya.

Suatu ketika Natsir menanggapi paham sekuleris Soekarno yang menyitir pendapat Syeikh Abdurraziq bahwa nabi hanya mendirikan agama saja tidak mendirikan negara. Ia mengatakan bahwa negara memang tidak perlu disuruh didirikan oleh rasulullah lagi. Dengan atau tidak dengan Islam, negara memang sudah berdiri sendiri dan memang sudah berdiri sebelum dan sesudah Islam, dimana saja ada segolongan manusia yang hidup bersama-sama dalam satu masyarakat. Hanya yang dibawa Islam adalah beberapa patokan untuk mendirikan negara . (Natsir, 1973 : 442-443). Apabila al Qur'an mengatur segala sesuatu yang menyangkut permasalahan manusia secara detail justru akan membuat Islam tidak fleksibel dan universal, sebab konteks kehidupan saat al Qur'an turun tentu sangat berbeda dengan konteks dimana al Qur'an harus dilaksanakan saat ini. Apabila demikian kejadiannya, maka al Qur'an tidak akan mampu mengatasi permasalahan ummat yang hidup sekarang.

Disini yang penting bagi Natsir bukanlah terletak pada Islam itu menyuruh mendirikan negara atau tidak, tetapi bahwa Islam mengandung substansi yang berisi aturan untuk mengarahkan kemana sebuah negara harus dibawa. Dengan demikian dapat ditarik benang merah dari keterangan ini bahwa

Islam dalam mendekati politik lebih bersifat praktis dan pragmatis dan tidak memandangnya secara transparan aspek-aspek teoritis politik kenegaraannya.

Maka, menurut Natsir konsep bahwa agama dan politik merupakan dua hal yang memiliki lingkungan yang terpisah sebenarnya lahir dari suatu kegagalan menangkap arti yang penuh dari agama, yang disebabkan oleh pengaruh kebendaan yang kuat yang meliputi kehidupan setiap hari. Itulah sebabnya amat perlu bagi kita untuk memahami dengan sesungguhnya apakah agama dan apakah fungsinya. (Natsir, 1988 : 207)

2. *Bentuk Negara Islam*

Seperti kebanyakan tokoh Islam lainnya, Natsir tidak terlalu menganggap penting bagaimana bentuk negara Islam. Baginya, bukan masalah sebenarnya apabila kita meniru sistem yang telah ada meskipun sistem itu berasal dari lain negara, asalkan ide dari sistem itu tidak berlawanan dengan konsep ajaran agama kita. Artinya, dalam mengadopsi sebuah ide luar Islam kita tidak boleh menutup mata atau membabi buta dan menerima begitu saja ide yang masuk, tetapi kita harus memiliki filter kultur, sehingga tidak semua budaya yang ada kita telan begitu saja. Disinilah menurut Natsir, fungsi ijtihad diperlukan. Ijtihad baginya merupakan sumber dinamik internal untuk mengatasi dinamik eksternal masyarakat. (Natsir, 1973 : 450)

Mengenai bentuk negara demokrasi yang saat itu menjadi trend di berbagai negara, Natsir mengatakan :

Barangkali orang akan berkata, "Bukankah Islam itu demokratis ?" Kita jawab ; Islam bersifat demokratis, dengan arti Islam itu anti istibdad, anti absolutisme, anti sewenang-wenang." (Natsir, 1973 : 452)

Suatu ketika ia menanggapi pelaksanaan demokrasi ala kemalisten,³ yang menerjemahkan demokrasi dalam "cratie" yang bermacam-macam karena kepentingan politis pribadi.

Islam adalah suatu pengertian, suatu paham, suatu *begrip* sendiri, yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam tidak usah "demokrasi" 100%, bukan pada otokrasi 100%, Islam itu,... ya "Islam" (Natsir, 1973 : 453).

Natsir setuju dengan bentuk negara demokrasi, tetapi dalam pengertian demokrasi Islam yang memberikan hak kepada rakyat, supaya mengkritik, menegur, membetulkan pemerintah yang zhalim. Kalau tidak cukup dengan kritik dan teguran Islam memberi hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezhaliman itu dengan kekuatan jika perlu. Jadi dalam demokrasi perspektif Natsir, rakyat merupakan komponen subyek yang harus didahulukan kepentingannya dengan cara memberikan hak yang semestinya mereka peroleh secara penuh. (Natsir, 1973 : 439)

³ Kemalisten merupakan panggilan yang diberikan Natsir kepada para pendukung Kemal Pasa, pemimpin Turki yang berhaluan sekuleris yang dianut oleh Soekarno.

Fungsi demokrasi ini harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Syura (musyawarah). Tetapi musyawarah ini hanya berlaku terhadap hal-hal yang perlu dimusyawarahkan saja. Kebebasan parlemen atas putusan mayoritas anggotanya dibatasi dalam hal-hal yang belum ditentukan dalam ajaran Islam. Artinya, parlemen tidak berhak membuat aturan-aturan yang telah diatur dengan kitabullah dan sunah rasul, yang perlu mereka musyawarahkan adalah bagaimana cara agar aturan tersebut bisa dilaksanakan dalam konteks kehidupan masyarakat. Hal ini tentu saja mengingat bahwa fungsi negara tidak lebih dari sekedar alat untuk menjamin ditegakkannya hukum tuhan.

Menurut Natsir, dalam parlemen negara Islam, tidak akan dimusyawarahkan terlebih dahulu apa yang harus menjadi dasar bagi pemerintahan, dan tidak musti ditunggu keputusan parlemen terlebih dahulu apakah perlu diadakan pembasmian meminum arak atau tidak, perzinaan dilarang atau tidak, perjudian dilarang atau tidak dan sebagainya, sebab masalah ini bukan merupakan hak musyawarah parlemen. Yang perlu diperbincangkan adalah cara-caranya untuk menjalankan semua hukum itu. Adapun prinsip dan kaidah sudah tetap tidak boleh dibongkar-bongkar lagi. (Natsir,1973 : 452)

Jadi keputusan itu tidak dapat melampui hudud (batas-batas) yang telah ditetapkan tuhan. Pada tahun 1957, dalam perdebatan mengenai dasar negara di majelis konstituante, Natsir menamakan demokrasi di dalam Islam dengan

istilah "*Theistic Democracy*", yaitu demokrasi yang dilandaskan pada nilai-nilai ketuhanan (Yusril, 1995 : 143)

Mengenai bentuk riil dari ide demokrasi ini, Natsir condong pada demokrasi liberal dengan sistem multi partai yang berlaku saat itu. Sebab menurut Natsir demokrasi semacam ini lebih memberi peluang/kesempatan kepada arus bawah untuk memberikan berbagai masukan bagi dinamika sosial dan juga membuka pintu bagi kritik-kritik konstruktif terhadap penguasa, sehingga diktatorisme dan absolutisme bisa ditekan sekecil mungkin kemunculannya.

Persetujuan Natsir pada status quo bentuk demokrasi liberal terlihat pada tahun 1957, saat Soekarno mulai menelurkan gagasannya tentang demokrasi terpimpin. Natsir merupakan orang yang paling getol melawan ide Soekarno itu. Demokrasi terpimpin menurutnya bisa memperbesar peluang bagi timbulnya diktatorisme di Indonesia, apalagi ide Soekarno tersebut didukung oleh komunis dengan Partai Komunis Indonesia sebagai ujung tombaknya. Pada waktu itu komunis memiliki partisipan massa cukup besar, sehingga hal ini cukup mengkhawatirkan Natsir yang memang sejak awal sangat menentang komunis yang merupakan agen marxisme dan sosialisme.

Alasan Soekarno mengapa ia menginginkan demokrasi terpimpin adalah bahwa konsep demokrasi liberal tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi timur menurut Soekarno tidak mengenal adanya

oposisi, karena semua golongan dalam masyarakat adalah ibarat sebuah keluarga yang *“alle leden van de familie aan tafel, aan de eetafel, en aan de werktafel”* (semua keluarga diajak menghadap meja yang sama, makan di meja makan yang sama, dan bekerja di meja kerja yang sama pula). Soekarno menyebutnya sebagai demokrasi gotong royong yang berasaskan kekeluargaan. (Yusril,1995: 149-150)

Natsir tidak mengenal dikotomi demokrasi timur dan barat. Baginya demokrasi adalah demokrasi, sebuah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan universal dan jauh dari sifat-sifat diktatorisme. Mengutip pendapat Radakhrisan, ia mengatakan bahwa sampai dengan perkembangan peradaban yang mutakhir, manusia belum menemukan adanya sistem lain yang lebih baik dari demokrasi. Walaupun mempunyai sisi-sisi kelemahan, demokrasi menurut Natsir adalah lebih baik dari sistem diktator. Walaupun proses demokrasi seringkali terkesan lamban dan kurang heroik. Demokrasi tampaknya memungkinkan dicapainya perubahan-perubahan revolusioner melalui sebuah proses yang damai. (Yusril, 1995 : 151-152)

Latar belakang inilah yang menyebabkan Natsir senantiasa kritis dalam setiap masalah yang keluar dari rel Islam. Budaya kritis ini senantiasa dibawa Natsir, bahkan di usia tuanya ia bersama beberapa teman-teman sepaham dan seperjuangan pernah turut menandatangani Petisi 50, sebuah petisi yang mengkritik kebijaksanaan pemerintahan orde baru (presiden Soeharto khu-

susnya) yang melakukan berbagai ketimpangan dalam melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁴

Perlaksanaan PEMILU dengan konstelasi penafsiran demokratis yang dijalankan saat ini juga tidak proporsional menurut Natsir, sebab tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada semua golongan dalam masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Dapat difahamkan, bahwa dalam konstelasi yang demikian sama sekali tidak ada tempat bagi satu perlombaan yang fair antara partai-partai politik, sebagaimana yang ada di negara demokrasi. Tak ada daya atau peluang sedikitpun bagi dua parpol "swasta" (PDI dan PPP) untuk berkompetisi dengan partai politik pemerintah (Golkar) dengan segala organisasi pendukungnya (Korpri, Ampri, KNPI, FBSI dan lain-lain). (Natsir, 1984 : 11)

Padahal menurut Natsir, negara dengan pemerintahannya harus mampu memberi wadah bagi kebebasan aspirasi dan gerak partai politik sebagai whana aspirasi rakyat, sehingga kehidupan yang benar-benar demokratis bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Ajaran Islam tentang demokrasi, menurut Natsir, harus dilandasi oleh tauhid sebagai asas utama. Pada tanggal 2 April 1972 Natsir berpidato di muka *Pakistan Institute of International Affairs*, Karachi dengan judul : *What and How can the Muslim Contribute to the Attainment of a Stable of World Peace*. Ia mengatakan :

⁴ Lebih jelas mengenai Petisi 50 ini, lihat Luqman Hakim (ed) Biografi Anwar Harjono, hal 545

“But Neither has Indonesia exclude religion from statehood. In a fact it has put the monotheistic creed in the one and only God, at the head of Pancasila “The Fife Principles” - adapted as the spiritual, moral, and ethical foundation of the state and the nation”. (Sadzali, 1993 : 452)

Pertalian rohani antara manusia dengan ilahi, yang berupa peribadatan yang khalis, adalah satu-satunya alat yang sempurna untuk menghindarkan semua perbuatan rendah dan mungkar (Natsir, 1973 : 440). Jadi tauhid ini harus menjadi dasar utama bagi sejauh apapun konsep kebijaksanaan politik dikembangkan, sehingga asumsi bahwa politik itu kotor tidak akan berlaku pada sebuah negara Islam.

3. Hak Asasi menurut Islam

Mengawali topik ini ada baiknya diutarakan motto yang disitir Mohammad Natsir dari Lionel Curtis :

“Freedom is a human and not western ideal. The whole earth is the temple of freedom. Its spirit moves wherever men are learning to do justice to each other”.

(Natsir, 1973 : 305)

Persetujuan Natsir atas apa yang dikatakan Curtis menunjukkan bahwa ia setuju dengan persamaan hak untuk merdeka. Kemerdekaan dalam arti kebebasan berfikir, berpendapat, berbicara dan segala hak kemanusiaan lainnya

dalam segala implikasinya tanpa memandang dimana dan siapa manusia itu, sebab setiap bagian dunia ini adalah "*temple of freedom*".

Respek Natsir terhadap prinsip kebebasan ini direalisasikan dalam bentuk negara demokrasi yang menjadi idenya. Masyarakat dalam sebuah negara Islam demokratis menurutnya mempunyai hak untuk mengkritik, menegur, dan membetulkan pemerintahan yang zhalim. Tentu sebagai *set back*-nya masyarakat harus taat kepada pemerintah manakala pemerintah itu sudah lurus dan berjalan sesuai dengan rel Islam.

Dalam menilai perilaku penguasa, seorang muslim harus berpijak pada obyektifitas. Hal inilah yang menyebabkan mengapa Allah dalam berbagai ayat senantiasa memerintahkan kepada manusia untuk berfikir, sebab hanya dengan berfikir manusia bisa mendapatkan hal-hal obyektif berdasarkan fakta yang ada. Sifat obyektif ini juga penting dalam kaitannya dengan upaya menghindari aroganisme dalam menjalankan fungsi masing-masing komponen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Natsir dalam Islam akal mendapat tempat yang mulia, akal tidak ditindas dan dipaksa, tetapi harus dipergunakan dan diberi jalan, disalurkan untuk ketinggian dan keluhuran manusia. Akal merdeka telah memerdekakan kaum muslimin dari kekolotan yang membekukan otak; dan akal merdeka telah melepaskan kaum muslimin dari *gedachte in dolentie*, dan kemalasan berfikir. (Natsir, 1973 : 240)

Tetapi Natsir mengingatkan bahwa akal merdeka harus dibatasi dengan ruh-ruh agama, sebab rasionalisme yang berlebihan bisa menghancurkan prinsip-prinsip persamaan itu sendiri. Baginya rasionalisme yang sudah tertanam dalam jiwa makhluk manusia menjadi sesuatu faktor yang menguasai seluruhnya, tidak terhambat-hambat lagi oleh tenaga-tenaga rohaniyah, yang layak mengimbangi kekuatan-kekuatan rasionalisme yang tak terkendali itu. Akibatnya ialah penguasaan ilmu dan pengetahuan semata-mata, yang kesudahannya mewujudkan rasialisme (diskriminasi berdasarkan ras dan warna kulit (penulis)), chauvisme yang sempit (ashabiayah jinsiyah), penumpukan harta dalam tangan beberapa orang, penciptaan kelas-kelas dan golongan yang berkedudukan istimewa, perkembangan antagonisme atau permusuhan kelas demi kelas, terus-menerus berlaku penguasaan golongan yang satu atas yang lain, yang kesemuanya menimbulkan gejala-gejala kebencian, dendam kesumat dan peperangan demi peperangan. (Natsir, 1988: 204-206)

Hak asasi dalam persepsi Natsir harus disandarkan kepada persamaan, tanpa memandang bangsa, ras, keturunan, suku, warna kulit dan perbedaan deskriminatif lainnya. Sesuatu bangsa memiliki hak untuk mengatur dirinya dan kapan saja bisa bersanding, bekerjasama, dengan bangsa lainnya. Implikasinya, Natsir amat antipati terhadap penjajah. Pada saat Belanda masih menjajah Indonesia, Natsir pernah mengkritik anak-anak muda Indonesia :

Cita-cita bangsa Belanda memang tidak akan persis sama dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sungguhpun begitu di kalangan Indonesia cukup

diketahui, bahwa ada juga kepentingan-kepentingan bersama yang perlu kepada pertalian “convergerende belangen divergerende verlangens”. Walaupun bagaimana, pada saat yang amat penting ini tidak ada satupun suara yang terdengar dari pihak anak Indonesia, bahwa mereka lebih suka “*ke neraka seorang diri, daripada masuk sorga dengan Nederland !*” Tidak ada ! (Natsir, 1973 : 310)

Anak Indonesia saat itu sangat kurang “*sense of belonging*”-nya terhadap negeri mereka sendiri dan tidak sadar bahwa sebenarnya penjajahan merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak asasi mereka. Oleh karena itu Natsir perlu mengingatkan mereka.

Mengenai kebebasan beragama, Natsir setuju bahwa hal itu merupakan hak individu yang sangat dihormati Islam. Islam memberikan keleluasaan kepada masing-masing individu untuk memeluk agama yang diyakininya. Dengan demikian di dalam Islam tidak ada pertikaian ideologi, benci-membenci karena berlainan agama dan sebagainya.

Di suatu masa, ketika dunia timur dan barat penuh benci-membenci dalam urusan agama, di zaman orang bunuh-membunuh lantaran pertikaian i'tikad, di zaman itu pulalah Muhammad SAW memperdengarkan suara baru “*tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah nyata jalan yang benar dan yang salah* (al Baqarah, 2 : 256). (Natsir, 1973 : 149)

Bagi kita umat Islam yang menimbulkan batas pemisah dalam kehidupan manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, dan antar negara, bukanlah oleh karena perbedaan keyakinan agama atau perbedaan warna kulit dan bangsa. Yang menimbulkan batas pemisah ialah sikap permusuhan terhadap Islam dan umat Islam itu sendiri. (Natsir, 1988 : 205-206)

Islam dengan tegas mengakui kemerdekaan berfikir dan beri'tikad. *Lāa ikraha fi ad dīen*. Islam tidak mengizinkan memaksa-maksakan agama dan kepercayaan. Sekalipun umat Islam di suatu masa dan di suatu tempat merupakan mayoritas, mereka dilarang oleh oleh kode etik islam memaksakan kepercayaan dan keyakinan agama mereka kepada minoritas yang beragama lain dari Islam. Bagi kita, jaminan kebebasan memiliki keyakinan agama bukan lagi harus berasal dari pernyataan hak-hak asasi manusia dari PBB yang sekarang ini digembar-gemborkan itu. (Natsir, 1968 : 19)

Kalaupun ada perintah dalam al Qur'an maupun hadits untuk mengajak mereka masuk Islam, itu hanyalah sebatas mengajak mereka, mau atau tidak deserahkan sepenuhnya kepada masing-masing individu. Kalau mereka ternyata menolak, maka kaum muslimin wajib bergaul dengan mereka dalam hubungan timbal balik dan hormat-menghormati.

Semata-mata perbedaan kepercayaan agamapun, bagi kita umat Islam bukanlah otomatis menjadi halangan untuk hidup berdampingan secara damai :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (سورة الممتحنة: ٨)

Artinya :

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam (urusan) agama, dan (orang-orang) yang tidak mengusir kamu keluar dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berlaku adil. (al Mumtahanah, 60 : 8) (Natsir, 1968 : 18)

4. Hubungan Internasional

Menurut Natsir, adanya keberagaman bangsa di dunia ini adalah merupakan sunatullah yang tidak bisa diubah-ubah. Tetapi keragaman ini tidak boleh dijadikan sumber sengketa dan kesombongan. Jadi diantara bangsa-bangsa ini harus hidup berdampingan, bekerja sama dalam kebersamaan dan kedamaian. Kecintaan kepada tanah air tidak boleh dijadikan alasan untuk menumbuhkan fanatisme, tetapi harus dijadikan pendorong bagi perlombaan dalam mencapai kemajuan dan mengembangkan sebanyak-banyak kemaslahatan bagi lingkungan yang lebih luas demi kebahagiaan hidup manusia. Tidak ada tempat bagi kecongkakan ras (rasialisme), tidak ada tempat bagi xenophobia, rasa benci sesama manusia lantaran berlainan bangsa. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al Hujrat ayat 13 yang menurut Natsir merupakan landasan bagi keserasian dan keseimbangan dalam hubungan antar bangsa. (Natsir, 1968 : 13-14). Natsir kemudian menyitir hadits nabi :

ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، لا فضل لعربي على
عجمي الا بالتقوى

Artinya :

Sesungguhnya yang termasuk diantara kamu pada sisi Allah ialah orang yang paling berbakti diantara kamu. Tidak ada kelebihan seorang arab dari orang ajam, melainkan taqwanya. (Natsir,1968 : 14)

Kaum muslimin harus mempunyai pandangan yang luas terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban dunia luar. Oleh karena itu Islam menyuruh pemeluknya untuk bersilaturahmi dalam rangka menimba pengalaman dari negara lain.

“Agama Islam menggemarkan pemeluknya pergi meninggalkan kampung dan halaman, berjalan ke negeri lain, saling bertukar pengetahuan, pemandangan-pemandangan dan perasaan-perasaan:

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب
يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا
تعى إلا بصرار ولكن تعى القلوب التي في
الصدور (سورة الحج : ٤٦)

Artinya :

“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar ? Katakanlah sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada.” (Khadim Haramain, 1995 : 519)

Kewajiban untuk haji, menurut Natsir, tidak hanya mempunyai nilai ibadah semata, tetapi juga memiliki dimensi hubungan antar bangsa, sebab dengan ibadah haji ummat Islam akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai bangsa di dunia, sehingga kemudian terjadilah apa yang disebut Natsir

sebagai akulturasi budaya yang amat penting untuk kemajuan bangsa-bangsa.
(Natsir, 1973 : 148)

Mengenai hubungannya dengan politik luar negeri, Yusril Ihza mengatakan bahwa dalam pidatonya di parlemen ketika ia masih menjabat perdana menteri⁵ Natsir mengatakan bahwa politik luar negeri negara Islam adalah politik luar negeri yang bebas. Ketika parlemen menanyakan politik yang bebas bagaimana, ia menjawab, bahwa bebas disini bukan berarti bebas yang *pasif*, tetapi bebas yang *aktif*. Jadi sebenarnya politik luar negeri bebas aktif yang digunakan pemerintah saat ini merupakan produk dari kabinet Natsir.
(Yusril, 1996 : 155)

Konsep politik luar negeri bebas aktif ini apabila dilaksanakan secara konsekwen akan memberikan pengaruh positif dalam pergaulan antar bangsa, sebab dengan konsep ini tidak akan ada perasaan lebih tinggi diantara masing-masing bangsa yang berlainan, sehingga perdamaian diatas dunia akan lebih mungkin dicapai. Disamping itu akulturasi dan transformasi budaya akan lebih cepat berkembang, dan pada gilirannya hal ini akan membawa bangsa-bangsa pada perkembangan yang seimbang.

⁵ Yusril mengatakan bahwa ia masih menyimpan dokumen Natsir tersebut. Dokumen tersebut berjudul "*Membangun diantara Puing dan Reruntuhan.*"